

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDI PERJUANGAN)
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PDI
PERJUANGAN**

**DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PADA HARI SELASA, 30 JUNI 2026**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om

Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan,

MERDEKA !!!

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten Setda, Para Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kebumen, Camat se-Kabupaten Kebumen, Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan Direktur RSUD Prembun;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen di manapun berada yang menangkap siaran Rapat Paripurna ini melalui siaran Radio In FM maupun Kebumen TV yang berbahagia,

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tidak lupa, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan yang

mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Akhir.
Amienn....

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen
mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Kebumen yang telah memberikan kesempatan kami
mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan
pandangan umum atas Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2025;

Kedua, Bupati Kebumen yang telah menyampaikan
Rancangan perda ini kemarin;

Ketiga, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan
seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi
Rapat Paripurna ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, **Fraksi PDI Perjuangan** DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

1. **Fraksi PDI Perjuangan** mengapresiasi atas diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI yang ke 12 (Dua Belas) kalinya diperoleh Kabupaten Kebumen dan 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak LKPD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2025, semoga atas tercapainya predikat tersebut tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menjadi lebih baik lagi dan terus melakukan berbagai macam perbaikan untuk mewujudkan *good governance*.
2. Kami juga melihat capaian pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 0,28% dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 mencapai 102,45% dari target Rp3.062.696.919.000,00 (*tiga triliun enam puluh*

dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) menjadi 102,17% dari target sebesar Rp3.004.119.240.372,00 (*tiga triliun empat milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*). Mengapa hal tersebut bisa terjadi, kami menginginkan bagaimana PAD bisa mendukung daerah dalam menciptakan pembangunan yang lebih mandiri tanpa bergantung pada anggaran pusat. Secara umum seluruh elemen yang terlibat dalam proses penggalan PAD harus bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis teknologi dan informasi sebagai strategi memperluas basis Pendapatan Asli Daerah.

3. Masih terkait dengan pendapatan, kami menyoroti ada beberapa perangkat daerah yang realisasi pendapatannya belum maksimal. Perangkat daerah tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dengan besaran PAD sebesar 89,81%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan besaran PAD sebesar 82,79%, Dinas Tenaga Kerja dengan besaran PAD sebesar 74,46%, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya mencapai 55,44%. Mohon dapat dijelaskan faktor penyebab pada masing-masing perangkat daerah yang realisasinya masih kurang dari target yang telah ditetapkan.

4. **Fraksi PDI Perjuangan** memandang bahwa penentuan target kinerja perangkat daerah terkait pendapatan asli daerah (PAD) saat ini belum sesuai dengan kondisi realnya. Kami mendorong agar penilaian target kinerja harus sesuai dengan kajian dan kondisi yang ada di lapangan sehingga target yang ditentukan dapat semaksimal mungkin.

5. Terkait dengan belanja, beberapa urusan pemerintahan memiliki capaian belanja kurang dari 80% yang antara lain urusan pemerintahan bidang

penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang pertanian. Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal karena rendahnya serapan pada belanja pegawai yang hanya sebesar 71,75%, urusan pemerintahan bidang sosial pada belanja pegawai sebesar 78,42% terkait hal tersebut kami mohon dapat dijelaskan. Kemudian, terkait urusan pemerintahan bidang pertanian pada belanja daerah hanya terserap 72,68%, belanja operasi terserap 71,62%, dan belanja barang dan jasa bahkan hanya terserap sebesar 59,66%, mohon dapat dijelaskan pula hal tersebut. Rendahnya serapan belanja memang tidak serta merta berbanding lurus dengan rendahnya kinerja dan sebaliknya. Kami sangat mengapresiasi perangkat daerah yang berprestasi sekaligus efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan. Oleh karena itu kami terus mendorong penguatan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun DPRD.

6. Terkait dengan piutang yang merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun 2025 total piutang pajak meningkat sebesar 3,98% dari tahun 2024 dan piutang retribusi meningkat sebesar 579,38%, mohon penjelasan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan sistem penagihan piutang, kami memandang bahwa tidak optimalnya sistem pengawasan dan penagihan, serta belum dikembangkannya sistem pengendalian secara otomatis.

7. Menurut pencermatan kami, SiLPA tahun 2025 adalah sebesar Rp. Rp221.114.900.087,98 (*dua ratus dua puluh satu milyar seratus empat belas juta sembilan ratus ribu delapan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah*). Menilai besarnya SiLPA mengindikasikan masih kurang tepatnya perencanaan anggaran atau masih belum optimalnya penyerapan anggaran. Mohon Penjelasannya. Kemudian, kami

berharap SiLPA tersebut dapat terpergunakan secara maksimal untuk membiayai program-program prioritas pada APBD Perubahan Tahun 2026.

8. **Fraksi PDI Perjuangan** meminta agar kedepan dalam implementasi anggaran harus lebih berkualitas artinya tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran saja. Sehingga dalam realisasinya tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Akan tetapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar benar - benar dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga *output*, *outcome*, sampai ke *impact* bisa terwujud. Selain daripada itu, **Fraksi PDI Perjuangan** juga berharap agar pemerintah lebih meningkatkan harmonisasi dengan badan anggaran, sehingga Visi Misi Kabupaten Kebumen kedepan dapat terwujud sesuai dengan harapan yang ada.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kepada Badan Anggaran yang nanti akan membahas Raperda ini kami ucapkan selamat bekerja, kami berpesan agar dalam pembahasannya nanti dapat lebih detail menyelami pasal per pasal dan lampiran demi lampirannya, agar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan angka dan kata. Kami mendorong agar pembahasan nantinya dapat segera dirampungkan agar roda pembangunan daerah dapat terus berputar. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MERDEKA !!!

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'S' shape that curves upwards and then downwards.

BAMBANG SUTRISNO, SE

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular initial 'A' followed by a series of loops and a horizontal line at the bottom.

ANDY RISDIANTO